



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

UPT PUSAT PENGEMBANGAN PUBLIKASI ILMIAH (P3I)

KAMPUS I : Jl. Mojopahit 666B Sidoarjo 61215 Telp. 0318945444, 8928097 Faks. 8949333

website : www.umsida.ac.id

email : p3i@umsida.ac.id

Nomor : E.6/40/33.00/KET/IV/2018
Perihal : Surat Keterangan Tidak Plagiat
Lampiran : -

Kepada Yth.

Bapak Hazim
Di

Tempat

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan adanya permohonan Surat Keterangan Tidak Plagiat untuk:
artikel berjudul :

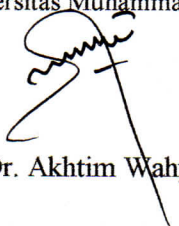
1. Dampak Sosial Dan Psikososial Bagi Pengungsi Pasca Konflik antara Sunni dan Syiah di Sampang Madura
2. Komodifikasi Pendidikan dan Hilangnya Nalar Kritis Masyarakat
3. Membangun Karakter Anak Jalanan berbasis Partisipasi Masyarakat
4. Penanggulangan Korupsi Berbasis Partisipasi Masyarakat pada PNPM Mandiri Perkotaan di Kabupaten Sidoarjo


dengan penulis Hazim, maka, dengan ini Pusat Pengembangan Publikasi Ilmiah (P3I) UMSIDA menyatakan artikel tersebut tidak plagiat dan telah mengikuti kaidah penulisan sesuai Committee on Publication Ethics (COPE) berdasarkan hasil cek plagiasi (Turnitin). Artikel yang bersangkutan digunakan untuk keperluan pengajuan jabatan fungsional akademik dosen.


Demikian surat keterangan ini kami sampaikan, mohon untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Mengetahui,
Wakil I
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo


Dr. Akhtim Wahyuni, M.Ag.


Sidoarjo, 30 April 2018
Ka. Sie Pusat Pengembangan Publikasi Ilmiah (P3I)
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo


M. Tanzil Multazam, S.H., M.Kn.

psikososial

by Hazim 1

Submission date: 10-Apr-2018 12:18PM (UTC+0700)

Submission ID: 944155965

File name: DAMPAK_SOSIAL_DAN_PSIKOSOSIAL_BAGI_PENGUNGSI.docx (148.6K)

Word count: 5799

Character count: 38605

DAMPAK SOSIAL DAN PSIKOSOSIAL BAGI PENGUNGSI PASCA KONFLIK ANTARA SUNNI DAN SYIAH DI SAMPANG MADURA

Hazim

ABSTRACT

Horizontal conflicts involving religious issues in Indonesia are still extremely dominant. Conflict between Sunni and Shia in Sampang Madura was the one case which has large impacts. The case occurred on August 26, 2012 resulted some disadvantages including financial aspects even death. This phenomenon was my research background to analyze social and psychosocial impacts experienced by refugees in their camps. The research focuses were horizontal conflict background occurred between Sunni and Shia in Sampang, Madura; Conflict resolution efforts; psychosocial and social impacts for Refugees Shi'ites in Rusun Puspa Agro Jemundo Sidoarjo. To answer this focus of study, this study used a descriptive qualitative analysis which focused on Shiites who has been evacuating at Jemundo Sidoarjo. The results of this study showed that the conflict was affected by many factors: ideological backgrounds, family conflicts, economic reasons, and a dynamic of local politic. Conflict resolutions have been conducted in several stages: stages of de-escalation; stages of humanitarian intervention and political negotiations; stages of problem solving approach; and the last, peace of building stages; which included the transition, reconciliation, and consolidation. Some psychosocial and social impacts of their existences as refugees are homeless, livelihood sources and they become dependences on other people or institutions for supporting their daily life. Regarding the basic needs, they have limited access to health and other social services. Moreover, children who live in the camps cannot access a proper education outside of the camps. They are also experiencing disorders of psychological development.

Key words: Social and Psychosocial impacts, conflict, refugees, Shia, Sunni.

ABSTRAK

Konflik horizontal yang melibatkan agama di Indonesia hingga kini masih sangat dominan. Konflik antara Sunni dan Syiah di Sampang Madura adalah salah satu contoh kasus yang menimbulkan dampak besar. Kasus yang terjadi pada 26 Agustus 2012 ini telah mengakibatkan 1 orang meninggal dunia, puluhan orang luka-luka, puluhan rumah terbakar dan ratusan warga Syiah dievakuasi. Fenomena ini mendorong peneliti untuk menganalisis dampak sosial dan psikososial yang dialami bagi para pengungsi. Penelitian ini difokuskan pada: Latar-belakang konflik, upaya resolusi konflik serta dampak sosial dan psikososial yang ditimbulkan pasca konflik bagi warga yang mengungsi di Rusun Puspa Agro Desa Jemundo Sidoarjo. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Subjek penelitian difokuskan pada Kelompok Syiah yang mengungsi di Rumah Susun Jemundo Sidoarjo. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa konflik ini dipengaruhi oleh banyak faktor: ideologis, keluarga, Motif ekonomi, Politik lokal. Upaya penyelesaian konflik dilakukan dalam beberapa tahapan: tahap de-eskalasi konflik; tahap intervensi kemanusiaan dan negosiasi politik; tahap *Problem solving approach*. Dan terakhir, tahap *Peace building*, yang meliputi transisi, rekonsiliasi, dan konsolidasi. Adapun dampak sosialnya adalah Kehilangan tempat tinggal; Kehilangan sumber mata pencaharian; Tercipta ketergantungan dengan pihak lain; Bagi anak-anak, terganggunya pendidikan anak-anak dalam pengungsian dan mengalami gangguan perkembangan psikologis; terpasung kebebasan: Terbatasnya akses layanan sosial kesehatan.

Kata Kunci: Dampak sosial dan psikososial, konflik, pengungsi

PENDAHULUAN

Konflik horizontal yang melibatkan agama di Indonesia hingga kini masih sangat dominan, baik yang bersifat antar agama maupun antar kelompok dan golongan sesama agama. Padahal dampaknya bisa sangat buruk dan mengerikan bagi kehidupan kemanusiaan. Martin menyatakan, *“social conflict involving religion is greatly feared as a result of the extreme violence against peoples and cultures perpetrated in the name of religion.”* (Bouma, 2001).

Era Reformasi di Indonesia pada 1998 merupakan tonggak kebebasan masyarakat sipil, termasuk kebebasan mengekspresikan gerakan keagamaan. Bagi warga Muslim, Menurut Julia Howell, kebebasan keagamaan diekspresikan dalam dua bentuk yang berbeda, pertama, secara *communalist*, tindakan komunal diwujudkan dengan membentuk partai politik untuk mendorong terwujudnya Negara Islam Indonesia. Dan kedua, *relatively autonomous modes of religiosity* yang ditandai dengan bermunculannya kelompok-kelompok Islam baru. (Howell, 2011), seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Front Pembela Islam (FPI), Majelis Mujahidin Indonesia, dan lain-lain. Masing-masing kelompok perbedaan satu-sama lain baik dari sisi pemikiran, platform dan karakteristik gerakannya. Perbedaan perilaku keagamaan sangat ditentukan oleh sudut pandanganya terhadap masalah disekitar.

Menjadi masalah ketika sebagian dari mereka mengklaim sebagai yang paling benar dan menolak kebenaran dari kelompok lain. (Hasan, 2011). Perbedaan *Worldview* yang dibarengi

dengan keterbatasan pengetahuan serta kesenjangan dalam beberapa aspek kehidupan sosial, seperti politik dan ekonomi antar satu dengan kelompok lainnya telah menjadi pemicu terjadinya konflik horizontal (Hasan, 2011). Wujud konfliknya bisa bermacam-macam. Mulai dari yang hanya bersifat konflik simbol hingga melibatkan fisik. Dampaknya juga bervariasi, dari tingkat yang ringan hingga sangat parah. (Lay, 2009).

Yayasan Denny JA mencatat bahwa sejak Reformasi 1998 hingga Desember 2012 telah terjadi 2,398 kasus konflik. Sebanyak 65% dilatarbelakangi oleh perbedaan agama atau perbedaan pemahaman keagamaan (Bangka 2012). Sebuah angka yang cukup fantastis karena terjadi di suatu Negara yang tidak sedang berkonflik.

Konflik antara dua kelompok agama, Syiah dan anti Syiah, di Sampang Madura pada 26 Agustus 2012 merupakan klimaks dari konflik yang telah berlangsung cukup lama dan berulang-ulang. Ini adalah salah satu konflik agama yang mengundang banyak perhatian dalam decade terakhir. Hal ini karena peristiwa tersebut selain mengakibatkan puluhan rumah rusak terbakar, tetapi juga sejumlah orang lainnya luka parah bahkan terdapat satu orang korban jiwa (Gatra, 2012). Konflik ini juga telah memaksa sejumlah warga syiah diungsikan ke Sidoarjo. Mereka di tempatkan di komplek pasar Puspa Agro Sidoarjo. Data terakhir tercatat yang mengungsi sebanyak 235 jiwa, terdiri atas orang dewasa dan anak-anak, yang semuanya dari kelompok Syiah (Tempo.co, 2014).

Keputusan untuk mengungsikan kelompok Syiah mungkin bisa menjadi

solusi untuk menghindari terjadinya konflik susulan antara kedua kelompok tersebut. Tetapi posisinya di pengungsian telah dan akan menimbulkan masalah sosial baru yang sangat kompleks bagi pengungsi. Mereka tidak mendapatkan hak untuk hidup dengan bebas dan menjalankan aktifitas sosial maupun ekonominya secara wajar. Modal sosial dan modal ekonomi mereka adalah di Sampang, bukan di Jemundo, Sidoarjo, apalagi berada di pengungsian yang tentunya penuh keterbatasan.

Dinamikan sosial terkait dengan konflik yang terjadi antara Syiah dan non syiah ini penting untuk dilakukan kajian secara mendalam berkaitan akar masalah timbulnya konflik, upaya resolusi serta dampak sosial bagi para pengungsi yang hingga kini masih berada di kompleks Rumah Susun Desa Jemundo Sidoarjo. Untuk itu, diperlukan sejumlah kajian teoritis agar bisa mengurai persoalan tersebut.

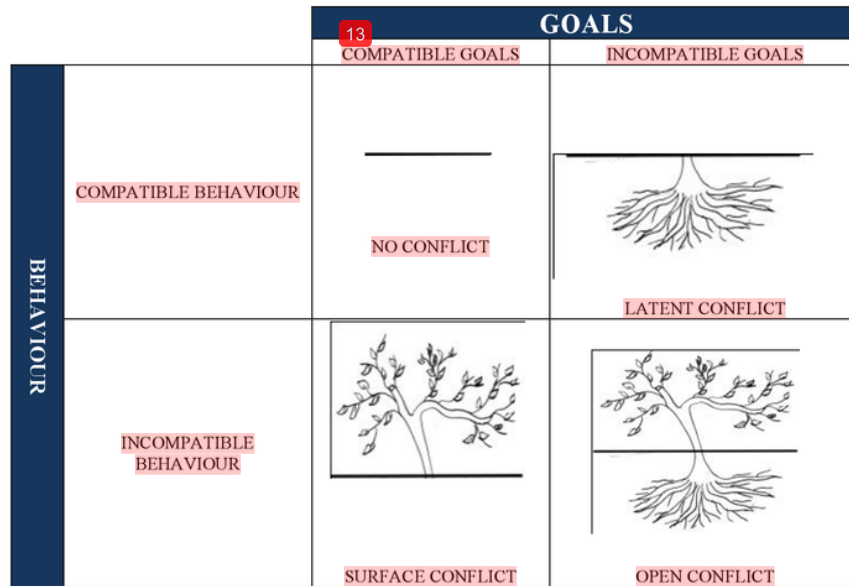
Secara etimologis, istilah konflik berasal dari bahasa latin dengan arti “bersama” atau *figere* yang memiliki arti “penyerangan”. Dalam kamus bahasa Indonesia, konflik adalah kata-kata yang memiliki arti “perkelahian”, “perlawanan”, dan penolakan tajam tentang suatu ¹kepentingan atau ide. Istilah konflik dalam bahasa Arab biasa diterjemahkan dengan kata *niza'* yang berarti pertentangan atau perse¹sihan. Definisi di atas sejalan dengan pemaknaan dalam bahasa Indonesia,

dimana konflik didefinisikan sebagai percekocokan, perselisihan, atau pertentangan. Sementara itu, Bahtiar (2011) mendefinisikan konflik sebagai “proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan tanpa memperhatikan norma dan nilai yang berlaku.”

¹Adapun secara terminologis, terdapat beragam definisi yang dikemukakan oleh para pakar. Pickering mengatakan bahwa “konflik tidak lebih dari adanya beberapa pilihan yang saling bersaing atau adanya ketidakse¹asan” (Bahtiar, 2011). Fisher menyebut konflik sebagai “hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau konflik) yang memiliki atau merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan” (Bahtiar, 2011). Sedangkan menurut Roxane, “konflik adalah adanya pertentangan antara dua atau lebih terhadap suatu peristiwa. Dengan kata lain adanya perbedaan antara dua individu, adanya saling permusuhan antara kelompok, atau adanya suatu masalah yang harus diselesaikan” (Bahtiar, 2011). Merujuk pada beberapa definisi di atas Bahtiar (2011) menyimpulkan bahwa konflik adalah “adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang membawa kepada ketidakharmonisan terhadap individu ataupun kelompok”.

Lebih jauh, Fisher (2007) mengilustrasikan konflik melalui diagram berikut:

Figure 2.1.
Goals and Behavior



Gambar di atas menunjukkan hubungan antara tujuan dan perilaku serta dampaknya berkaitan dari konflik:

- 5 - **No conflict:** A common perception may be that the box on the top left, no conflict is preferable. However, any peaceful group or society, if it is to endure, must be lively and dynamic, incorporating conflicts of behavior and goals and addressing them creatively.
- **Latent conflict** is below the surface and, as already suggested may need to be brought in to the open before it can be effectively addressed.
- **Surface conflict** has shallow or no root and may be only misunderstanding of goals that can be addressed by means of improved communication.
- **Open conflict** is both, deep-rooted and very visible, and may require actions that address both the root causes and the visible effects. (Fisher 2007)

Berdasarkan tipologi yang diformulasikan oleh Fisher, konflik antara Suni dan Syiah di Sampang yang

meledak pada 26 Agustus 2014 dapat dikategorikan sebagai konflik terbuka (open conflict). Eskalasi konflik yang meningkat setelah terjadi perbedaan prinsip atau tujuan dan masing-masing pihak dan tidak bisa menjaga sikap untuk melakukan tindakan preventif. Akibatnya konflik terbuka tak dapat dihindarkan.

Konflik sosial bisa terjadi dalam beberapa bentuk. Bouma membagi konflik Agama ke dalam tiga kategori: pertama, konflik antara dua kelompok agama yang memiliki kekuatan hampir berimbang untuk memperebutkan sejumlah sumber daya dan sesuatu yang dipandang penting dalam hidup, seperti: pekerjaan, tanah, makanan atau kekuatan politik. Kedua, konflik yang terjadi terhadap kelompok minoritas yang bisa terjadi ketika diantara mereka memiliki sejarah diperlakukan secara diskriminatif, diusik kenyamanannya atau karena sering difitnah baik oleh pimpinan maupun

anggota kelompok masyarakat setempat. Masyarakat, dengan berbagai alasan, tidak bersedia memberikan ruang bagi kelompok minoritas tersebut untuk tinggal bersama masyarakat pada umumnya. Ketiga, konflik yang terjadi ketika Pemerintah bertindak represif terhadap suatu kelompok agama atau masyarakat tertentu. (Bouma 2001). Dalam konteks konflik Suni dan Syiah di Sampang, dapat dikategorikan konflik yang kedua. Konflik yang terjadi antara kelompok Suni sebagai kekuatan mayoritas dengan kelompok Syiah yang merupakan kelompok minoritas.

a. Resolusi konflik.

Secara empirik, menurut Andi Widjayanto yang dikutip oleh Syafuan (2008) menjelaskan bahwa resolusi konflik dapat dilakukan dalam empat tahapan. Tahap pertama adalah de-eskalasi konflik. Tahap ini, konflik yang terjadi masih diwarnai dengan pertikaian. Upaya yang dilakukan masih berurusan dengan kondisi yang mengarah pada konflik fisik. Sehingga proses resolusinya terpaksa harus melibatkan militer untuk memulai (*entry point*) proses resolusi konflik.

Tahap kedua adalah Intervensi kemanusiaan serta negosiasi politik. Pada saat de-eskalasi sudah terlewati, intervensi kemanusiaan bisa dilakukan bersamaan dengan negosiasi antar elit politik untuk meredam ketegangan. Pada fase ini, kental orientasi politik dengan tujuan mencari kompromi politik antara para pelaku yang terlibat konflik.

Ketiga, Pendekatan *Problem solving*. Fase ini dimaksudkan untuk membangun situasi kondusif untuk para elemen yang berkonflik dalam rangka mentransformasikan hal-hal

yang menjadi ranah konflik mereka ke arah upaya penyelesaian.

Lebih lanjut, proses problem solving secara empirik, Syafuan (2008) mengungkapkan bahwa terdapat empat komponen utama. Pertama, setiap komponen bersedia menerima pihak lain yang menginisiasi interaksi awal. Kedua, kedua belah pihak menjelaskan fakta yang sebenarnya berkaitan dengan kompleksitas masalah yang mereka hadapi. Baik itu yang menyangkut sebab-sebab konflik, akibat psikologis yang ditimbulkan dari adanya konflik, maupun kendala-kendala di masyarakat yang bisa menghambat fleksibilitas mereka dalam melakukan proses penyelesaian konflik. Ketiga, masing-masing pihak mendapatkan pola interaksi yang diinginkan untuk menyampaikan pesan-pesan perdamaian. Keempat adalah workshop tentang problem solving dengan maksud untuk menciptakan suasana kondusif bagi semua pihak terkait dalam rangka melakukan proses resolusi konflik.

Tahap Keempat adalah *Peace building* yang terdiri dari tahap transisi, rekonsiliasi, dan konsolidasi. Transisi merupakan tahap yang memerlukan waktu cukup lama mengingat hal ini menyangkut orientasi kultural dan struktural. Tahap selanjutnya adalah Rekonsiliasi yang memungkinkan diterapkan ketika rapuhnya kohesi sosial menjadi potensi konflik terdalam yang dialami oleh suatu kelompok. Biasanya hal ini disebabkan oleh beragam kondisi struktural yang menyertai selama perjalanan sejarah di masyarakat yang sedang berkonflik tersebut. Tahapan yang terakhir adalah konsolidasi. Pada tahap ini, "*Quo Desiderat Pacem, Praeparet Pacem*" menjadi semboyan

utama yang ingin ditegakkan adalah. Semboyan ini menuntut para aktor untuk secara berkelanjutan melakukan intervensi perdamaian terhadap struktur di masyarakat. Pola ini bisa dilakukan dengan dua tujuan utama; mengantisipasi terjadinya konflik kembali serta mengkonstruksikan proses perdamaian dalam kurun waktu yang lama atas inisiatif dari para pihak yang sedang bertikai.

Selain empat tahapan di atas, ada beberapa macam usaha yang bisa dilakukan untuk mewujudkan perdamaian, yaitu:

1. *True graduated and reciprocated initiatives* (TGRI)

Teori yang dikembangkan oleh Charles Osgood ini menjelaskan pentingnya melakukan konsesi lateral untuk menjalin perdamaian. Dalam hal ini bisa dilakukan dengan cara: 1) mengeluarkan pernyataan umum mengenai keinginan untuk mengurangi konflik. Hal ini harus mendapatkan dukungan publik serta tanggung jawab yang sama bagi kelompok lain untuk lebih bekerjasama. 2) Menyuarakan keinginan perdamaian meskipun tidak ada keinginan serupa dari kelompok lain. 3) ketika kelompok lain ingin bekerjasama, maka harus direspon dengan cepat. 4) tetap menjaga kemampuan untuk bertindak keras untuk menjaga terjadinya eksploitasi dan penyerangan kembali dari kelompok lain.

2. Mediasi.

Untuk melaksanakan upaya resolusi konflik diperlukan strategi mediasi. Dalam rangka itu, maka mediasi harus dibangun atas landasan filosofis kerahasiaan (*confidentiality*), kerelawanan

(*voluntariness*), pemberdayaan (*empowerment*), kenetralan (*neutrality*), solusi yang unik (*unique solution*).

3. Negosiasi.

Agar negosiasi dapat berjalan dengan baik, Muhsin Jamil dalam Mundiroh (2014) membagi beberapa tahap. Pertama, menfokuskan pada *interest*. Artinya mencari kepentingan yang sama bukan kepentingan dalam posisi sendiri-sendiri. Kedua, berusaha mencari opsi tentang substansi *interest* obyektif yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Ketiga, mengadakan evaluasi mempertimbangkan memilih *interest* mana yang dijadikan dan lebih bersifat praktis dapat dilaksanakan atau *interest* yang menguntungkan kedua belah pihak. Semua yang telah disepakati tercatat secara tertulis sebagai dokumen. Kelima, masing-masing pihak harus berkomitmen mematuhi kesepakatan yang telah dibuat.

4. Superordinate

Pengenalan akan identitas *superordinate* cara yang umumnya dilakukan untuk mengatasi konflik antara kelompok. Ketika kelompok merasa bahwa mereka memiliki identitas yang mirip maka rasa kepemilikan akan lebih besar dan tidak hanya terkait dengan kelompok mereka saja dan interaksi antar kelompok menjadi damai. (Mundiroh, 2014).

b. Dampak sosial pasca konflik bagi pengungsi.

Relokasi warga Syiah ke pengungsian sebagai upaya menghindari konflik sesungguhnya bukan tanpa menimbulkan masalah.

Hal ini berakibat munculnya sejumlah masalah baru. Baik jangka pendek maupun jangka panjang.

¹ United Nation High Commission for Refugees (UNHCR) menjelaskan bahwa pengungsi adalah mereka yang berpindah dari tempat tinggalnya disebabkan oleh adanya unsur pemaksa. Unsur tersebut bisa berupa bencana alam seperti banjir, kekeringan, kebakaran, gunung meletus, tanah longsor, gelombang pasang air laut, tsunami, wabah penyakit maupun bencana sosial seperti peperangan dan konflik sosial. Kenyamanan dan keselamatan diri beserta keluarga adalah tujuan mengungsi. Dilihat dari durasinya, pengungsian bersifat sementara sampai pada waktu yang kondusif dan akan kembali ketika keadaan sudah aman.

Meski demikian, mereka harus tetap terjamin hak asasi manusianya. Hal ini tertuang dalam hasil Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, serta Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik bahwa mereka berhak untuk memeluk agama, terbebas dari perbudakan, penyiksaan, mendapatkan bantuan humaniter, kebebasan untuk berpindah, jaminan keamanan, pendidikan serta berhak mendapatkan informasi mengenai keberadaan keluarganya.

Ada lima prinsip kebutuhan perlindungan sebagaimana diatur oleh badan PBB Koordinator Urusan Kemanusiaan (OCHA) bagi pengungsi. (Gunanto Surjono, dkk. 2004: 7) Yaitu:

- 1). Perlindungan umum meliputi hak memperoleh persamaan perlakuan hukum, kebebasan bersuara, perlindungan dari tindak diskriminasi,

dan perlindungan khusus terutama untuk pengungsi anak-anak, ibu hamil, perempuan kepala rumah tangga, lanjut usia serta orang cacat.

- 2). Perlindungan terhadap kemungkinan paksaan jadi pengungsi karena diskriminasi warna kulit, pembersihan etnis, agama dan politik.

- 3). Perlindungan selama masa pengungsian internal dari tindak genoside, pembunuhan, penculikan, penahanan, kekerasan, perampokan, penyanderaan, pemerkosaan, penghukuman kerja, penyiksaan, pencacatan, perbudakan, eksploitasi, pelecehan seksual, pengekangan gerak, pemaksaan ikut bertikai, penurunan martabat, moral dan mental. Pengungsi juga memperoleh hak untuk mengetahui tentang keberadaan keluarganya dan dipertemukan kembali, pemakaman yang layak apabila meninggal, memperoleh informasi tentang pilihan hidup yang lebih baik, pergi ke negara lain yang dipandang aman dan mencari suaka ke negara lain.

- 4). Bantuan kemanusiaan berupa makanan, pakaian, kesehatan atau obat-obatan, pendidikan, hiburan, dan pelayanan administrasi kependudukan. Pemerintah dan pihak swasta harus menjamin kelancaran dan keamanan dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan tersebut sehingga terhindar dari gangguan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dan berbagai hambatan birokrasi.

- 5). Bantuan pemulangan, relokasi dan integrasi dengan masyarakat tempat pengungsi berada.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Metode ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara terstruktur⁷ sesuai dengan fakta-fakta yang akurat, sifat-sifat serta hubungan antar peristiwa atau gejala yang diselidiki sehingga memperoleh

data-data penting terkait dengan konflik yang terjadi antara Suni dan Syiah di sampang, khususnya mengenai dampaknya bagi pengungsi.

Lokasi penelitian difokuskan pada warga Syiah yang berada di kompleks pengungsian dalam kompleks Puspa Agro, Jemundo, Taman Kabu¹²en Sidoarjo Jawa Timur. Untuk itu, jenis data yang diperlukan adalah data primer dan data⁷under. Subagyo (2004:87) menyatakan data primer yaitu “data yang diperoleh peneliti secara mentah dari sumber data dan masih memerlukan analisis lebih lanjut.” Untuk mendapatkan data primer, peneliti menggunakan teknik interview, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder menurut Subagyo (2004:87) merupakan “jenis data yang diperoleh atau berasal dari bahan-bahan kepustakaan.” Data yang dimaksud bisa terdiri dari buku, majalah, jurnal, media cetak, media online, dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari; observasi, interview, dan studi dokumen adalah Interview, Observasi, dan studi dokumen.

Pertama, secara umum observasi dapat dilakukan melalui dua cara: pertama, observasi partisipan dimana peneliti menjadi bagian dari kelompok yang diteliti. Kedua, observasi non partisipan. Teknik ini memposisikan peneliti sebagai orang di luar subjek penelitian dan kehadirannya hanya sebagai pengamat kegiatan (Nasution, 1996, 107- 108). Adapun teknik yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi non partisipan. Teknik ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang cukup berkaitan dengan peristiwa konflik antara Kelompok Suni dan Syiah di sampang Madura serta kondisi yang terjadi di Pengungsian Desa Jemundo Sidoarjo. Obyek yang

diobservasi antara lain adalah kondisi tempat tinggalnya di pengungsian, aktifitas saat di pengungsian dan pola interaksi sosialnya.

Kedua, wawancara. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data secara primer melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada subjek penelitian (Abu Ahmadi, 1997, 83). Ditinjau dari pelaksanaannya, (Arikunto, 132) menjelaskan bahwa interview dapat dibedakan menjadi tiga kategori. Yaitu:

“Interview bebas: pewawancara bebas menanyakan apa saja, tetapi juga mengingat data apa yang akan dikumpulkan. Interview bebas ini dilakukan dengan tidak membawa pedoman wawancara tentang apa yang ditanyakan. Kedua, Interview terpimpin, yaitu interview yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederatan pertanyaan lengkap dan terperinci. Ketiga, Interview bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara interview bebas dan interview terpimpin.”

Pada penelitian ini, yang digunakan adalah interview bebas terpimpin yang menggunakan pedoman wawancara. Adapun yang menjadi informan adalah perwakilan dari pihak-pihak yang terlibat langsung dalam kasus ini, serta sejumlah warga Syiah yang mengungsi di Puspa Agro Jemundo.

Selain dua hal di atas, penggalian data juga menggunakan teknik studi dokumen. Teknik ini digunakan dalam mengkaji tentang berbagai media maupun dokumen yang memiliki keterkaitan baik langsung maupun tidak dengan topik penelitian. Di antaranya adalah buku-buku referensi utama bagi kelompok Suni maupun Syiah, dokumen-dokumen dari MUI, baik berkaitan dengan fatwa maupun lainnya. Dokumen-dokumen pemerintah yang berkaitan dengan persoalan penelitian. Serta sejumlah media yang mengulas mengenai kasus

konflik antara Suni dan Syiah di Sampang Madura.

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis diskriptif kualitatif. Teknik ini digunakan karena data yang akan didapatkan berupa rangkaian kalimat atau paragraf yang ternyata berupa narasi secara deskriptif berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di lokasi penelitian.

Teknik analisa ini dimaksudkan untuk bisa memberikan gambaran secara menyeluruh tentang dampak sosial konflik yang terjadi antara Suni dan Syiah serta mampu menggali berbagai upaya yang dilakukan oleh sejumlah pihak dalam rangka menanggulangi terjadinya konflik susulan. Untuk mengkaji data, peneliti menggunakan logika berfikir induktif. Artinya memulai dari peristiwa-peristiwa spesifik berdasarkan pengalaman di lapangan. Hasilnya kemudian dirumuskan menjadi model, konsep, teori atau definisi yang bersifat umum. Mulyana⁷ (2001, 156- 157) menjelaskan bahwa **Induksi adalah** “proses dimana peneliti mengumpulkan data dan kemudian mengembangkannya suatu teori dari data tersebut.”

Langkah-langkah analisis data dalam studi ini, peneliti mengacu pada Miles, Huberman dan Yin (Suprayogo, 2001, 192-197). Antara lain:

a). Pengumpulan data. Kegiatan analisis data selama pengumpulan data dimulai setelah peneliti memahami fenomena-fenomena yang sedang diteliti dan setelah mengumpulkan data yang dapat dianalisis.

⁷ Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Data yang diperoleh dari lapangan ditulis dalam bentuk uraian atau laporan terinci. Data dalam bentuk laporan tersebut perlu direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang

pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema atau polanya.

c). Display data, yaitu rangkaian kalimat yang disusun secara logis dan sistematis atau menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan ketika dibaca akan mudah dipahami tentang berbagai hal yang terjadi dan memungkinkan peneliti untuk membuat suatu analisis atau tindakan lain berdasarkan pemahamannya tersebut.

d). Penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu suatu upaya untuk mencari kesimpulan dari permasalahan yang diteliti. Dari data penelitian yang sudah dianalisis dapat diambil kesimpulan serta memverifikasi data tersebut dengan cara menelusuri kembali data yang telah diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Latar Belakang dan dinamika konflik

Konflik terkait isu agama antara Sunni-Syiah di Madura ini telah berlangsung sejak 2004. Meskipun bentuknya hanya letupan-letupan kecil yang kemudian mereda. Hanya saja tidak banyak yang menyadari bahwa konflik kecil tersebut menyimpan potensi konflik (*latent conflict*) yang jika ada pemicu lebih besar akan mengakibatkan konflik yang bersifat terbuka (*Open conflict*) seperti yang terjadi pada Ahad, 26 Agustus 2012. Akibat dari peristiwa tersebut, satu orang tewas, 45 titik pembakaran yang terdiri dari 80 rumah terbakar, serta 282 warga harus mengungsi. (Ikli). Hingga kini, (23 Januari 2015), masih terdapat sebanyak 180 jiwa yang mengungsi di kompleks Rumah Susun Puspa Agro Sidoarjo.

Hasil kajian dari sejumlah sumber menunjukkan, bahwa latar belakang adanya konflik ini sangat kompleks; Ideologi, Keluarga, ekonomi serta Politik. Pertama, secara ideologis, antara Sunni dan Syi'ah

memiliki riwayat konflik yang cukup panjang yang diakibatkan oleh perbedaan cara pandang mengenai status Ali bin Abi Thalib. Oleh karena itu, kemunculan Keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Propinsi Jawa Timur No. Kep-01/SKF-MUI/JTM/I/2012 yang menyatakan Syi'ah sebagai aliran sesat juga menjadi variabel pemicu terjadinya konflik horizontal di Karang Gayam Omben Sampang. Selain itu, juga disebabkan oleh adanya pernyataan dari Pengurus Wilayah NU dan Ulama Badan Silaturrahmi Ulama Pesantren Madura yang menyatakan bahwa Syi'ah sebagai aliran sesat sehingga penganut harus dibaiat kembali ke Sunni. (Mundiroh. 2014).

Kedua, faktor keluarga turut memberikan andil terjadinya konflik. Sebagaimana diungkapkan oleh Mabes Polri, insiden Sampang memiliki indikasi konflik antar keluarga, yang melibatkan anak-anak mendiang Kiai Makmun, yang disebut-sebut telah menganut Syiah semenjak dia tertarik Imam besar Syiah Iran, Ayatullah Khomeini, di awal tahun 80-an. Salah-satu anak Kiai Makmun, Roisul Hukama (40 tahun) tersinggung dan marah, setelah gagal menyunting santri pesantren Misbahul Huda, yang mengajarkan Islam Syiah, milik kakaknya, Jul Muluk (41 tahun). Sejak saat itu, Rois menyatakan keluar dari Syiah, dan rajin berkampanye menyatakan Syiah sebagai ajaran sesat. (Heyder Affan, 2013).

Ketiga, Persoalan ekonomi politik juga menjadi faktor pemicu terjadinya konflik sosial ini. Andy Irfan, Koordinator Kontras Surabaya mengatakan motif berlatar ekonomi politik diduga kuat berkaitan dengan

kepentingan investasi migas di Madura. Beberapa bulan sebelum peristiwa pembakaran, sejumlah rumah di Dusun Nangkernang, Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben, Sampang, disurvei oleh otoritas Migas pemerintah. Aktivitas eksplorasi migas di sana, juga membuka jalan baru yang melewati rumah warga. Kejanggalannya, Kenapa bukan jalan desa yang dilebarkan dan diperbaiki. Malah menggunakan lahan lain. Patut diduga konflik ini sengaja diciptakan untuk mengusir sebagian warga yang tanahnya digunakan untuk eskplorasi dan eksploitasi migas.

Selain itu, menurut informasi dari Ikilil, (pengurus Syi'ah Sampang), ada dugaan bahwa pengusiran warga Syi'ah juga dilatar-belakangi adanya kekhawatiran para Ulama yang anti Syiah akan kehilangan potensi ekonomi diakibatkan oleh ajaran Syi'ah yang menawarkan tentang tradisi Maulid Nabi Muhammad SAW secara berkelompok dan pembiayaan ditanggung bersama dengan maksud untuk meringankan beban ekonomi warga. Dengan demikian dalam satu event bisa merepresentasikan untuk banyak orang maupun keluarga, otomatis alokasi transport untuk Kyai yang diundang juga hanya sekali. Padahal dalam tradisi lama di kampung tersebut, warga terbiasa menyelenggarakan kegiatan Maulid Nabi secara mandiri dari rumah ke rumah dan tentu Kyai bisa menghadiri event lebih banyak dan transport tentu lebih banyak lagi. (Eddy, 2012).

Motif lain yang juga bisa mendasari konflik ini adalah kontestasi politik lokal. Menurut Andy, konflik ini ditunggangi oleh kepentingan politisi-politisi lokal

jelang pemilu pada Sampang. Ketidaksiampuan Pemerintah Kabupaten Sampang melindungi kaum minoritas dan membiarkan terjadinya konflik adalah lebih dikarenakan untuk menjaga lumbung-lumbung dukungan. (Eddy, 2012). Sumber lain mengatakan bahwa Bupati pernah melarang atau menolak keberadaan Syiah di Kabupaten Sampang. (Mundiroh, 2014). Sementara itu, menurut Ketua Komnas HAM, Irfidhal Kasim, bahwa kasus ini mencerminkan bentuk kegagalan pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada warganya yang menganut kepercayaan Syiah. (Eddy, 2012).

Serangkaian eskalasi konflik yang terjadi hingga meledaknya pada tanggal 26 Agustus 2012 merupakan cerminan dari terjadinya pertemuan antara *incompatible behavior* dan *incompatible goals* (Fisher, 2007). Suni dan Syiah sudah jelas memiliki prinsip dan tujuan (goals) yang berbeda. Yang berarti memiliki potensi konflik yang tinggi. Sejak tahun 2004, *latent conflict* sudah membayangi di antara kedua kelompok tersebut. Ketika perilaku (behaviors) tidak terkontrol, sehingga memicu *incompatible behaviors*, maka yang terjadi adalah *open conflict*.

b. Upaya penyelesaian konflik.

Untuk melihat upaya penyelesaian konflik Suni dan Syiah di Sampang, tulisan ini membatasi pada kasus konflik yang terjadi 26 Agustus 2012 yang menimbulkan korban jiwa dan warga syiah diungsikan.

Sebagaimana pembagian tahapan resolusi konflik menurut Andi Widjayanto, maka tahap penyelesaian konflik antara Suni dan

Syiah di Sampang Madura melalui tahapan sebagai berikut:

1. Tahap de-eskalasi konflik.

Meledaknya konflik pada 26 Agustus 2012 bermula ketika sejumlah rombongan siswa dari komunitas Syiah yang akan kembali ke Bangil, Pasuruan telah berlibur hari raya idul fitri. Saat hendak kembali itu, puluhan massa sudah menghadang dan mengancam akan membakar dan membunuhnya karena sebenarnya mereka tidak diizinkan untuk belajar ke Bangil. Aksi pun berlanjut dengan melakukan pembakaran sejumlah rumah warga Syiah. Aksi pembakaran mengakibatkan bentrok antara dua kelompok. Setelah membakar, ribuan massa dari kelompok Sunni mulai melakukan penyisiran dengan bergerombol di sekitar SDN Karang Gayang, Omben, Sampang yang diduga menjadi tempat persembunyian beberapa warga Syiah. (seruu.com, 2012) Untuk melakukan de-eskalasi, beberapa pasukan bantuan mulai didatangkan. Satuan Peleton Brimob Pamekasan pun menjaga lokasi tersebut. Untuk menanggulangi konflik lebih besar, ratusan pengikut aliran Syiah, Minggu (26/08/2012) malam, diungsikan dari kampung halamannya menuju GOR Indoor kota Sampang. (seruu.com, 2012).

2. Intervensi kemanusiaan dan negosiasi politik.

Untuk mengantisipasi kejadian bentrok semakin meluas, ratusan pengikut aliran Syiah, Minggu (26/08/2012) malam, diungsikan dari kampung halamannya menuju GOR kota

Sampang. Gubernur Jawa Timur yang turun ke lokasi konflik langsung menginstruksikan kepada Bupati untuk memberikan tempat yang layak bagi semua pengungsi penganut aliran Syiah. Langkah selanjutnya, Pemerintah Propinsi Jawa Timur membentuk tim rekonsiliasi yang diketuai oleh Abu A'la (Rektor IAIN Sunan Ampel Surabaya). Tim ini bertugas untuk melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dengan target warga Syiah bisa kembali ke kampung halaman. Upaya yang dilakukan adalah dalam bentuk dialog yang melibatkan ulama Suni dan Syiah. Dari beberapa fasilitasi dialog ternyata belum menemukan hasil yang bisa disepakati. Kelompok Suni mensyaratkan agar Syiah bertobat, sedangkan Kelompok Syiah tidak merasa bersalah sehingga tidak mau bertobat. karena belum ada kompromi yang bisa disepakati. (Kompas 2013).

3. Tahap ketiga, *Problem solving approach*.

Langkah *problem solving* sudah diupayakan kedua belah pihak melalui beberapa tahapan. Pada 23 September 2013, sebanyak 50 perwakilan warga Sampang mendatangi penampungan sementara jamaah Syiah Sampang di rumah susun Puspa Agro, Jemundo, Sidoarjo. Kedua belah pihak membuat Ikrar Damai untuk mewujudkan perdamaian di antara warga yang terlibat konflik kekerasan di wilayah tersebut. Perwakilan warga Suni-Sampang, Muhjaroh mengatakan, pihaknya akan terus mengajak warga untuk mewujudkan perdamaian di Sampang, yang dapat terwujud bila didukung semua pihak termasuk

pemerintah. Sayangnya pertemuan ini tidak dihadiri oleh para tokoh masyarakat dan ulama Madura. (Kiblat. 2013) Tim yang telah menyepakati damai ini kemudian bertemu dengan Wantimpres bidang Hukum dan HAM, selanjutnya bertemu dengan Ketua MPR RI, untuk menyampaikan perkembangan rekonsiliasi Sampang yang meniscayakan faktor keamanan bagi pengungsi Syiah Sampang untuk kembali ke kampung halaman. Menanggapi hal itu, para ulama Madura di antaranya K.H Ali Karrar dan K.H Syafiuddin Wahid mensyaratkan dilakukan pembinaan untuk pengungsi di Ponpes Assiddiqiyah asuhan K.H. Noer Iskandar S.Q. sebelum pembangunan perumahan warga Syiah Sampang. (Sampang, 2014).

Selain itu, warga Sampang, yang dulunya terlibat berseberangan dengan Syiah, dalam beberapa bulan terakhir ini sudah intens berkomunikasi, bahkan menurut informasi dari Ust. Ikhlil, hampir setiap hari ada warga Sampang yang berkunjung dan silaturahmi dengan kelompok Syiah di Komplek Rusun Jemundo. Ini adalah perkembangan yang memberikan signal harapan baik untuk membangun perdamaian di bumi Karanggayam Sampang. Walaupun hingga saat ini, belum ada langkah konkrit yang mengarah pada pemulihan dan penyediaan fasilitas tinggal di Sampang.

4. Tahap Keempat, *Peace building*:

Upaya membangun perdamaian (*peace building*) meliputi tahap transisi, rekonsiliasi, konsolidasi. Langkah ini selama beberapa tahun belakangan ini

nampaknya belum menunjukkan progres yang menggembirakan. Untuk mengupayakan *peace building*, ada beberapa komponen yang patut menjadi perhatian (Commentaries. 2013). *Pertama*, rekonstruksi infrastruktur yang rusak akibat konflik, termasuk rumah yang terbakar. Dari sejumlah rumah yang terbakar, hingga kini belum ada realisasi untuk rekonstruksi baik dari pemerintah maupun dari masyarakat sendiri secara swadaya.

Kedua, Repatriasi (pemulangan) adalah hal yang harus dilakukan. Meskipun hingga kini sebagian masyarakat Sampang masih keberatan dengan kepulangannya, tapi dari perspektif psikologis pengungsi, pemulangan adalah yang terbaik jika dibandingkan dengan relokasi, meskipun kondisinya lebih baik. Untuk itu, Pemerintah harus mampu memberikan jaminan keamanan bagi para kelompok yang berkonflik.

Ketiga, harus ada upaya rekonsiliasi di antara kedua belah pihak. Dalam hal ini sangat penting adanya mediasi untuk terwujudnya kesepakatan damai dalam satu kawasan meskipun harus dibungkus dengan perbedaan pandangan. *Keempat*, Perlu dibangun pola komunikasi yang santun, yang tidak memicu pada ketersinggungan, sehingga walaupun harus ada yang berbeda tetap bisa berjalan berdampingan dengan nir-kekerasan. Langkah ini penting dilakukan sebagai bagian dari konsolidasi internal sesama warga.

Kelima, Aparat keamanan harus menjadi benteng terakhir penjaga perdamaian di lokasi yang

rawan konflik tersebut. Polri harus berani mengerahkan kekuatan penuh yang terencana dan terukur – *full force of law*. Tidak cukup dengan tindakan persuasif saja. Juga diperlukan tindakan represif yang *legitimate* dari Polisi sebagai unsur negara yang diberi kewenangan menggunakan kekerasan atau ancaman penggunaan kekerasan.

c. Dampak Sosial dan Psikososial bagi pengungsi.

Konflik antara Suni dan Syiah telah menimbulkan sejumlah dampak sosial yang cukup besar. Kasus tersebut telah mengakibatkan sebanyak sekitar 180 jiwa mengungsi. Awalnya mereka diungsikan di GOR sampang, dan selanjutnya tanggal 20 Juni 2013 dipindahkan ke Rumah Susun Puspa Argo Jemundo Sidoarjo.

Keberadaannya di pengungsian tentu bukan merupakan solusi terbaik, tapi justru menimbulkan sejumlah dampak lanjutan yang harus dialami oleh mereka. Di antaranya adalah:

1. Kehilangan tempat tinggal untuk sementara waktu, bahkan tidak menutup kemungkinan bisa terjadi untuk seterusnya jika penduduk di wilayah konflik ini tidak tercipta kesepakatan yang memungkinkan kedua belah pihak bisa hidup berdampingan secara aman dan damai kembali. Hingga kini, berdasarkan informasi dari Iklil (Koordinator Pengungsi Syiah) sebanyak sekitar 80 rumah warga Syi'ah yang terbakar dari dua Desa juga belum ada pihak yang membantu merehab kembali. Sementara itu, dari Pemerintah belum memberikan kepastian

alternatif solusi, apakah akan disiapkan tempat tinggal baru, atau dipulangkan, atau alternatif pemecahan yang lain.

2. Kehilangan sumber mata pencaharian. Sebelumnya, mayoritas mereka adalah petani yang sangat tergantung dengan lahan yang dimiliki di Desanya sebagai sumber ekonomi. Ketika mereka pindah dari desanya dan harus tinggal di pengungsian, mereka sudah tidak memungkinkan lagi menggarap lahannya di desa asal sementara ternaknya terpaksa harus dijual untuk menyelamatkan asetnya. Bahkan pada saat kejadian, sejumlah warga Syiah masih memiliki tanaman tembakau siap panen, tapi tidak sempat dipanen karena kondisi tidak memungkinkan. Untuk menambah penghasilan di pengungsian, sebagian aktifitas mata pencahariannya hanya mengandalkan sebagai buruh di pasar Puspa Agrowisata dengan penghasilan yang tidak menentu. Di antaranya ada yang bekerja sebagai pengupas kelapa dengan upah yang minim, itupun tidak setiap hari.
3. Tercipta ketergantungan dengan pihak lain. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di pengungsian mereka mendapat disubsidi dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur, berupa uang sebesar Rp. 709.000 perjiwa. Hanya saja pengungsi tidak tahu hingga kapan subsidi ini akan diberikan. Pada saat yang sama, pengungsi—dengan kondisi yang mengalami banyak keterbatasan—juga secara umum tidak memiliki rencana alternatif untuk

mendapatkan *income* seandainya subsidi ini dihentikan. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian masa depan para pengungsi tersebut.

4. Terganggunya pendidikan anak-anak dalam pengungsian. Saat ini, terdapat 1 anak SMA, 2 anak SMP, dan 50 anak duduk di bangku SD. Untuk anak usia SMP dan SMA difasilitasi sekolah di desa sekitar Pengungsian. Sementara yang SD difasilitasi sekolah di dalam kompleks rumah Susun diperuntukkan khusus bagi anak pengungsi. Kondisinya pun jauh dari standart kualitas pendidikan. Karena keterbatasan dalam banyak aspek, Anak-anak SD dikelompokkan hanya dalam 2 ruang kelas. Satu ruang untuk anak kelas 1-3, dan satu ruang untuk anak kelas 4-6 SD. Tentu ini bukan hal yang mudah bagi guru untuk mendidik para siswa dalam satu kelas dengan tingkatan kemampuan dan usia yang beragam. Apalagi fasilitas yang dimiliki juga sangat terbatas. Jika kondisi ini terus berlangsung, maka akan sangat berpengaruh pada perkembangan psikologis anak, dan selanjutnya akan sangat berdampak pada rendahnya Sumber Daya Manusia bagi generasi mendatang yang sekarang mengungsi ini.
5. Bagi anak-anak, mengalami gangguan psikologis karena mereka berada dalam pusaran konflik secara berulang-ulang. Dampaknya anak-anak akan terbiasa dalam kondisi kekerasan, sehingga bukan tidak mungkin mereka kelak akan tumbuh menjadi anak yang bermental kasar dan frontal yang diakibatkan

oleh akumulasi pengalaman kekerasan yang dialami.

6. Terpasung kebebasan dasar mereka. Dalam pengungsian, mereka menjadi kelompok yang teralienasi dari masyarakat. Padahal Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan interaksi satu sama lain dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat fisik maupun psikologis. Keberadaannya di pengungsian, membuat mereka mengalami keterbatasan dalam hal berinteraksi. Mereka tidak memiliki kebebasan untuk berinteraksi dengan komunitas di luar pengungsi. Lebih-lebih pada anak yang memerlukan stimulan interaksi dari masyarakat lebih luas lebih dari sekedar komunitasnya di pengungsian untuk mendukung pengembangan dirinya, secara mental maupun sosial.
7. Terbatasnya akses layanan sosial kesehatan. Sejak keberadaan mereka di pengungsian Puspita Agro, sudah terdapat sebanyak 5 Ibu yang melahirkan. Tragisnya, mereka melahirkan di tempat tinggalnya di pengungsian tanpa di dampingi oleh tenaga medis. Padahal melahirkan merupakan saat yang sangat beresiko dan sejumlah kemungkinan buruk bisa saja terjadi. Untungnya mereka bisa menjalani persalinan dengan selamat.
8. Dampak lain yang harus menjadi perhatian dalam jangka panjang adalah terjadi pemiskinan yang akan dialami oleh para pengungsi, karena mereka tidak memiliki kepastian penghasilan maupun kepemilikan aset. Aset lama yang

berada di tempat tinggal asal tidak terkelola dengan baik, sementara di pengungsian tidak cukup memiliki kesempatan untuk memperoleh aset kehidupan yang baru. Sedangkan Subsidi dari Pemerintah hanya cukup untuk pemenuhan kebutuhan konsumtif sehari-hari.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan pada pembahasan di atas, yang bisa diambil sebagai kesimpulan adalah: *Pertama*, Konflik antara Sunni-Syiah di Sampang Madura yang mencapai klimaks pada 26 Agustus 2012 dilatar belakangi sejumlah faktor; 1) Secara ideologis, antara Sunni dan Syi'ah memiliki riwayat konflik yang cukup panjang yang diakibatkan oleh perbedaan cara pandang mengenai status Ali bin Abi Thalib. 2) Faktor konflik antar keluarga turut memberikan andil terjadinya konflik; 3) Motif ekonomi menjadi faktor lainnya dari adanya konflik ini. Selain itu, 4) Politik lokal juga faktor lain yang memperkeruh konflik Sunni dan Syi'ah di Sampang.

Kedua, Kasus yang terjadi antara Sunni dan Syiah sudah dilakukan sejumlah rangkaian upaya untuk melakukan resolusi konflik. Rangkaian yang sudah dilakukan adalah: tahap de-eskalasi konflik; tahap intervensi kemanusiaan dan negosiasi politik; tahap *Problem solving approach*. Dan keempat, tahap *Peace building*; yang meliputi transisi, rekonsiliasi, dan konsolidasi.

Ketiga, keputusan direlokasikannya warga Syiah ke pengungsian memberikan menimbulkan sejumlah dampak sosial bagi pengungsi: Kehilangan tempat tinggal untuk sementara waktu, bahkan tidak menutup kemungkinan bisa terjadi untuk seterusnya jika penduduk di

wilayah konflik ini tidak tercipta kesepakatan yang memungkinkan kedua belah pihak bisa hidup berdampingan secara aman dan damai kembali; Kehilangan sumber mata pencaharian; Tercipta ketergantungan dengan pihak lain; Terganggunya pendidikan anak-anak dalam pengungsian; Bagi anak-anak, mengalami gangguan psikologis; terpasung kebebasan dasar pengungsi; Terbatasnya akses layanan sosial kesehatan; Selain itu, dalam jangka panjang adalah terjadi pemiskinan yang akan dialami oleh para pengungsi.

ORIGINALITY REPORT

14%

SIMILARITY INDEX

12%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

media.neliti.com

Internet Source

4%

2

Septi Asri Lestari, Hendro Kusumo Eko Prasetyo Moro. "Perbandingan Variasi Jarak Tempuh ke Sekolah terhadap Prestasi Belajar IPA Siswa Kelas VII SMP Muhammadiyah 2 Kalibawang", JURNAL BIOEDUKATIKA, 2015

Publication

2%

3

dk-insufa.info

Internet Source

2%

4

www.bbc.com

Internet Source

1%

5

Submitted to University of Central Lancashire

Student Paper

1%

6

www.gatra.com

Internet Source

1%

7

digilib.uinsby.ac.id

Internet Source

1%

www.grutee.blogspot.com

8

Internet Source

1 %

9

Submitted to University of Stellenbosch, South Africa

Student Paper

<1 %

10

Submitted to University of Melbourne

Student Paper

<1 %

11

Submitted to University of Auckland

Student Paper

<1 %

12

etheses.uin-malang.ac.id

Internet Source

<1 %

13

discovery.ucl.ac.uk

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 15 words

Exclude bibliography On